

ENERGIKITA

VOLUME I

MARET 2017



ENERGIKITA

Adalah media yang terbuka bagi seluruh mitra dari Kemitraan Strategis untuk Energi Bersih dan Inklusif.

Para mitra dapat berpartisipasi dalam media ini dengan mengirimkan artikel, berita, foto ke iesr@iesr.or.id

Salam ENERGIKITA

Mengawali bulan Maret 2017 ini Institute for Essential Services Reform (IESR) menghadirkan ENERGIKITA, sebuah buletin kecil yang akan menjadi media komunikasi bagi IESR dan para mitranya tergabung dalam proyek *Strategic Partnership for Clean and Inclusive Energy* untuk berbagi cerita dan berita mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Dalam edisi perkenalan ini, ENERGIKITA akan mengulas tentang *Strategic Partnership for Clean and Inclusive Energy*, apa saja kegiatan dan ceritanya. Selain itu, ada pula pojok kebijakan yang membahas tentang Permen No. 12/2017 mengenai Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Terbarukan, dan cerita lainnya dari lapangan mengenai proyek energi terbarukan.

Penyediaan energi yang bersih dan inklusif memang menjadi tantangan baru sekarang ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saat ini ada lebih dari 1 milyar orang yang belum menda-

patkan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Kebanyakan dari mereka adalah kelompok terpinggirkan, seperti orang miskin, kaum perempuan dan mereka yang hidup di kawasan terpencil dan terisolir.

Oleh karena itu, peranan kelompok masyarakat sipil untuk saling bekerjasama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, media dan CSO dari isu non-energy menjadi sangat penting. Kelompok masyarakat sipil diharapkan tak hanya mampu untuk mendorong kebijakan energi yang bersih dan berkelanjutan, tapi juga kebijakan yang berpihak kepada semua golongan, transparan dan partisipatif.

Dengan demikian energi bisa memenuhi kebutuhan semua orang dan mereka bisa meningkatkan dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Selamat menikmati ENERGIKITA

Strategic Partnership for Clean and Inclusive Energy dikelola oleh:

Hivos
people unlimited



Kemitraan Strategis untuk Energi Bersih dan Inklusif (Strategic Partnership for Clean and Inclusive Energy bertujuan untuk mendorong transisi menuju sistem energi yang bersih dan inklusif untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan dan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi dampak perubahan iklim



Perumusan rencana kerja Kemitraan Strategis dilakukan melalui kegiatan workshop yang diikuti oleh mitra Kemitraan Strategis dan Pemangku Kepentingan di sektor energi

Kemitraan Strategis untuk Energi Bersih dan Inklusif

Pada tahun 2016, Hivos bersama Pemerintah Belanda meluncurkan program global bernama **Strategic Partnership for Clean and Inclusive Energy** atau Kemitraan Strategis untuk energi bersih dan inklusif.

Kemitraan ini dilaksanakan di tujuh negara yaitu Indonesia, Nepal, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Nikaragua dan Guatemala, dan akan bekerja hingga tahun 2020.

Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana lebih dari

satu milyar orang di seluruh dunia tidak dapat menikmati akses energi bersih dan terjangkau.

Tidak adanya akses energi ini telah mempengaruhi taraf hidup masyarakat untuk menikmati kesempatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, Mereka juga erada dalam situasi yang paling rentan akibat dampak perubahan iklim

Program Kemitraan ini focus pada lobi dan advokasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemangku ke-

pentingan dan publik mengenai isu energi dan mendorong percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan lebih inklusif.

Di Indonesia, Kemitraan Strategis untuk energi bersih dan inklusif dikelola oleh Hivos bersama tiga mitranya yaitu Institute for Essential Services Reform (IESR), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Mereka adalah organisasi yang memiliki pengalaman dalam advokasi di sektor energi, konsumen dan perempuan

Kick-off Workshop

Sebagai penanda dimulainya kegiatan Kemitraan Strategis untuk Energi Bersih dan Inklusif, Hivos menyelenggarakan Kick-off Workshop yang berlangsung di Yogyakarta, **25-28 Oktober 2016**

Workshop ini dibagi ke dalam dua sesi panel, dimana hari pertama diisi dengan diskusi bersama para pemangku kepentingan di sektor energi seperti perwakilan dari Kementerian dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masyarakat energi terbarukan, masyarakat pengguna energi terbarukan di Sumba

Dalam diskusi ini dibahas mengenai penting pentingnya kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan, sebab sektor ini memiliki aspek yang sangat beragam dan perlu menjadi perhatian mulai dari pengembangan teknologi, bisnis model sehingga aspek sosial dan lingkungan

Sementara di hari Kedua, diikuti oleh mitra kemitraan strategis yaitu oleh Hivos Southeast Asia, IESR, YLKI, KPI yang membahas tentang teori perubahan dengan menetapkan tataran kondisi yang diharapkan dan intervensi intervensi yang dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi kemitraan.

Kemitraan ini akan bekerja untuk :

- Meningkatkan kapasitas CSO mengenai pemahaman energi dan advokasi dalam kebijakan energi nasional
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan massa mengenai isu energi sehingga akses energi energi bagi masyarakat dapat tersebar luas dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
- Menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Rencana Kerja IESR

Sebagai organisasi yang fokus pada isu energi IESR akan berkoordinasi dengan:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk menjangkau kelompok konsumen energi.

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kegiatan penyadaran mengenai kesetaraan gender dalam pengelolaan energi dan kelompok perempuan.

Media Briefing Workshop



Guna meningkatkan kesadaran media dan mendorong kebijakan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengada-

kan workshop untuk media nasional dan lokal yang berlangsung di Bali, tanggal 1 Februari 2017.

Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, sebagai negara kepulauan Indonesia harusnya mengembangkan energi terbarukan untuk penyediaan energi bersih bagi masyarakat. Namun sayangnya, hingga kini penyediaan energi bersih masih sangat terbatas pemanfaatannya. Salah satu aspek yang perlu dibenahi dalam pengembangan energi terbarukan adalah pembuatan kebijakan yang bisa mendorong pengembangan

pasar energi terbarukan dan minat investasi di sektor ini.

Sementara kalangan dunia usaha yang diwakili oleh PT Pertamina dan PLN menjelaskan tentang komitmen perusahaan untuk terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pembangunan proyek-proyek geothermal, dukungan bagi program EBT skala komunitas atau pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan.

Workshop ini juga menghadirkan Fabby Tumiwa dan Deepak DG seorang konsultan biogas di Bali.

“Cadangan energi fosil Indonesia semakin menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat. Peralihan ke Energi terbarukan menjadi pilihan yang tepat”

Capacity Building Workshop

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan capacity building workshop yang berlangsung di Jakarta, 13 Februari 2017.

Workshop yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari anggota Kemitraan Strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam memahami isu energi di Indonesia.

Dalam pemaparannya Direktur

Eksekutif IESR menjelaskan tentang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil seperti minyak, gas dan batubara. Situasi ini cukup memprihatikan karena cadangan energi fosil Indonesia tidak terlalu besar dan semakin menurun jumlahnya. Sementara itu, kebutuhan akan energi di Indonesia terus meningkat secara tajam. Oleh karena itu pilihan untuk beralih kepada energi terbarukan seperti menjadi pilihan yang sangat tepat, karena selain berimpah, en-

ergi terbarukan juga lebih bersih, sehingga kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan orang miskin bisa menjadi lebih baik



Tantangan Energi Terbarukan dari Sibetan

Desa Sibetan terletak di kawasan perbukitan di Kabupaten Karangasem, Bali. Letaknya yang terpencil membuat masyarakat di desa ini sulit untuk mendapatkan akses energi. Jangankan penjual tabung gas yang harus membawa dagangannya, masyarakat saja sering kesulitan menjinjing tabung berwarna hijau melon itu. Terkadang mereka hanya menggelindingkan saja tabung tersebut hingga ke ujung desa.

Di tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai mengembangkan proyek energi biogas dengan pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Proyek dikembangkan sejalan dengan cita-cita pemerintah Bali yang ingin menjadikan provinsi ini sebagai Green Island dan mengembangkan energi bersih dan kegiatan yang ramah lingkungan.

Melalui kerjasama antara pemerin-

tah kabupaten bersama LSM Kalimajari dan Institute for Global Justice, Desa Sibetan menjadi salah satu desa percontohan yang mendapatkan bantuan berupa teknologi pengembangan biogas berbasis rumah tangga **(bersambung hal.4)**



Pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan energi terbarukan

Tantangan Sibetan

Ada enam Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan, mereka dipilih berdasarkan kategori keluarga miskin dengan jumlah anggota keluarga minimal lima orang, memiliki sampah yang cukup, akses bahan bakarnya sulit dan bersedia untuk merawat bantuan yang telah diberikan.

Selain di Sibetan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga berhasil mengajak PT Pertamina Persero untuk berpartisipasi dalam pengembangan model energi terbarukan di tingkat komunitas melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dan memberikan bantuan teknologi biogas.

Namun setelah empat tahun berjalan, proyek ini sekarang hanya menyisakan 2 unit biogas yang beroperasi, 1 unit yang terletak di sebuah warung di desa Sibetan dan 1 unit lagi yang berada di peternakan sapi di desa Batubulan Kanging, Kabupaten Gianyar. Sehari-harinya biogas ini dapat beroperasi selama dua jam.

Dalam pertemuan dengan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sulastri yang berlangsung pada 1 Februari lalu, tim YLKI menyampaikan mengenai pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di kabupaten ini, termasuk dukungan pendanaan untuk memperluas instalasi. Dengan begitu akan timbul kesadaran masyarakat untuk beralih dan menggunakan energi terbarukan. Dukungan yang kuat dan berkelanjutan juga bisa menjadi contoh bagi pema lainnya di provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten menyambut baik masukan ini, mengingat besarnya kebutuhan masyarakat akan energi. Selain itu, pengembangan energi yang bersih akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas kerja.

(Yhuni Wahyu YLKI)



Perencanaan yang partisipatif dan transparan bisa menjadi kunci keberlanjutan program energi bersih di masa depan

Pojok Kebijakan

PERMEN NO.12 /2017 Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

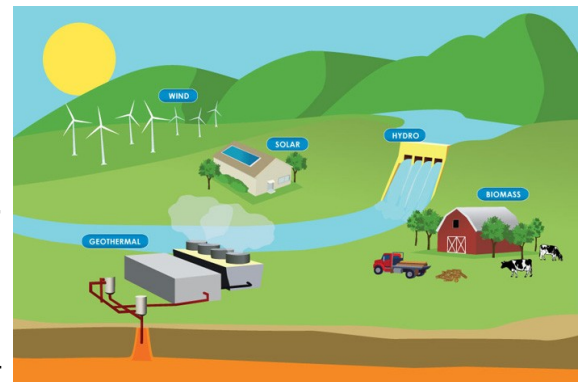
Pada tanggal 30 Januari 2017, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Permen No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Hal-hal yang diatur dalam Permen ini adalah :

- **Kewajiban PLN untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan** seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin), Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
- **Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik**, untuk PLTS dan PLTB pelepasan berdasarkan kuota sesuai dengan RUPTL dandengan minimum paket sebesar 10 MW, Sedangkan untuk PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, PLTP melalui harga patokan dan pemilihan langsung
- **Harga Pembelian Tenaga Listrik**, Maximum 85% Biaya Pokok Produksi (BPP) setempat, jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari rata-rata BPP nasional.

100% BPP setempat , jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari rata-rata BPP Nasional

- **Penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.** Pengembangan Pembangkit Listrik (PPL) wajib menggunakan komponen dalam negeri yang memenuhi SNI, Standar Internasional atau standar lain yang tidak bertentangan dengan ISO dan IEC
- **Sanksi.** PPL dikenakan sanksi dan atau pinalti jika terlambat dalam mengerjakan pembangkit listrik



“Dengan keluarnya Permen NO 12 /2017 ini berarti sistem insentif berupa *Feed-in-Tariffs* tidak berlaku lagi. Permen ini tidak selaras dengan upaya pencapaian target EBT dalam bauran energi sebesar 23% yang akan dicapai pada tahun 2025, dimana kapasitas EBT yang harus dipasang mencapai 45 GW atau bertambah 35 GW dari capaian yang ada saat ini . Namun demikian permen ini masih dapat memberikan peluang pembangkit listrik di luar pulau Jawa”

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR